

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Kota Bandung sebagai ibu kota provinsi Jawa Barat secara geografis terletak di tengah-tengah provinsi Jawa Barat memiliki keunggulan kompetitif tersendiri dibanding kota-kota lain dan mempunyai nilai strategis terhadap daerah-daerah di sekitarnya. Kota Bandung dikenal sebagai *Paris van Java* (bahasa Belanda), sebagai Eropanya daerah tropis. Pada jaman revolusi, Bandung dikenal dengan semangat perjuangan yang dikenal dengan “Bandung lautan api”. Bandung juga dikenal sebagai tempat penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika yang pertama (KAA). Banyaknya monumen atau bangunan bersejarah di Kota Bandung menjadi daya tarik tersendiri. Bangunan lain yang cukup dikenal sebagai warisan budaya dan menjadi ciri Kota Bandung antara lain Gedung Sate, Aula-aula Institut Teknologi Bandung (ITB), Pasteur Institut, dan lain-lain. Sampai sekarang, warisan budaya tersebut masih terpelihara dengan baik, bangunan bersejarah telah dilindungi dengan peraturan daerah, bahkan telah dicanangkan sebagai salah satu tujuan wisata warisan budaya secara nasional.

Kota Bandung merupakan pusat kegiatan pemerintah daerah, sosial politik, pendidikan, dan kebudayaan, juga merupakan pusat perkembangan dan industri, karena itu Bandung juga merupakan daya tarik para urbanisasi untuk mencari pekerjaan. Banyaknya pendatang dari berbagai daerah nusantara ke Kota Bandung untuk menuntut ilmu maupun bekerja, menjadikan penduduk Kota Bandung sangat heterogen. Pada saat ini Bandung selain terkenal dengan daerah wisata belanja, juga terkenal sebagai pusat kuliner, baik kuliner lokal Jawa Barat yaitu aneka macam kuliner sunda maupun kuliner dari berbagai daerah nusantara. Mulai dari tempat kuliner yang eksklusif, mewah, mahal sampai tempat kuliner yang unik dan tradisional semuanya tersedia di Bandung dalam waktu 24 jam. Didukung dengan objek wisata yang menarik sehingga mengundang banyak wisatawan dan didukung dengan penduduk yang heterogen membuat bermunculan tempat penginapan, mulai dari hotel berbintang sampai losmen di

tempat yang strategis, sehingga banyak yang mendirikan hotel di wilayah Kota Bandung (Oda, 2012 : 1)

Letak Kota Bandung yang strategis sebagai kota perdagangan, jasa, industri, pendidikan (dengan banyaknya universitas), dan kota wisata akan mendorong tumbuh kembangnya industri perhotelan dan restoran. Perkembangan industri tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah, khususnya dari Pajak Hotel dan Pajak Restoran. Untuk itu, penelitian ini dilakukan pada Kota Bandung untuk periode tahun 2009 hingga tahun 2013.

1.2. Latar Belakang Penelitian

Pajak menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam rangka mendukung perkembangan otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang berasal dari pajak daerah perlu ditingkatkan lagi. Daerah diberi wewenang untuk menggali sumber dana yang sesuai dengan potensi dan keadaan daerah masing-masing, sehingga nantinya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan kewenangannya, pajak dapat dibedakan sebagai Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Mengenai Pajak Daerah, peranannya juga sangat penting sebagai sumber Pendapatan Daerah dan sebagai penopang Pembangunan Daerah, karena Pajak Daerah merupakan salah satu Sumber Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang antara lain berupa Pajak Daerah dan Retribuasi Daerah, menjadi salah satu sumber pembiayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah Retribusi Daerah yang aturan pelaksanaannya berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah yang kemudian disempurnakan kembali menjadi Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah adalah jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Provinsi dan jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Kabupaten. Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diatur mengenai jenis Pajak Kabupaten/ Kota yaitu sebagai berikut:

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 tanggal 4 Juli 1997 tentang Pajak Daerah, yang dimaksud dengan:

1. Hotel adalah bangunan yang khusus untuk orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.
2. Restoran atau rumah makan adalah tempat menyantap makanan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran.

3. Pajak Hotel dan Restoran adalah pajak yang dipungut atas pelayanan di hotel dan restoran.
4. Objek Pajak Hotel dan Restoran adalah pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel dan atau restoran.

Sumber penerimaan daerah yang potensial bagi Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung adalah Pajak Restoran dan Pajak Hotel, ini dikarenakan jumlah restoran dan hotel mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan jumlah restoran dan hotel di Kota Bandung merupakan hal positif bagi peningkatan pendapatan asli daerah Kota Bandung. Semakin banyak restoran dan hotel, semakin besar pemasukan untuk peningkatan pendapatan asli daerah. Seperti halnya pada tabel 1.1 yang menjelaskan peningkatan jumlah hotel dan restoran pada tahun 2009-2013.

Tabel 1.1
Jumlah Hotel dan Restoran di Kota Bandung
Tahun 2009-2013

Tahun	Restoran	Hotel
2009	669	374
2010	682	386
2011	701	373
2012	654	374
2013	769	438
Jumlah	3.475	1.945

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung

Dari tahun ke tahun, jumlah pertumbuhan hotel dan restoran di Kota Bandung mengalami peningkatan. Hal ini menandakan semakin tingginya permintaan jasa perhotelan dan restoran di Kota Bandung. Dalam artikel Kompas yang dimuat pada tanggal 31 desember 2011 (www.kompas.com), kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Bandung cukup besar dalam hal kunjungan pariwisata ke Kota Bandung, sektor ini dapat menyumbang 50 persen PAD Kota Bandung. Kontribusi PAD sektor pariwisata yang terbesar adalah bersumber pada perhotelan dan restoran. Sektor perhotelan dan restoran

menyumbang devisa bagi Kota Bandung senilai total Rp 130 miliar. Untuk perhotelan, kontribusinya sekitar Rp70 miliar. Sedangkan restoran, kontribusinya sejumlah Rp 60 miliar. Sektor pariwisata yang terdiri dari Pajak Hotel dan Pajak Restoran pertumbuhannya signifikan. Setiap tahun tumbuh 14,8 persen dan rata-rata kontribusinya 68,7 persen bagi PAD Kota Bandung. Guna meningkatkan pajak sektor perhotelan dan restoran, pemerintah Kota Bandung melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah. Caranya dengan menyederhanakan sistem sekaligus prosedur pelayanannya yang dapat memudahkan wajib pajak dan dapat menaikkan PAD Kota Bandung. Tercatat dari tahun 2009 sampai tahun 2013 perkembangan realisasi Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Kota Bandung mengalami peningkatan yang terdapat pada tabel 1.2 dan tabel 1.3.

Tabel 1.2
Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kota Bandung
Tahun 2009-2013

Tahun	Pajak Hotel		%
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	
2009	74.892.445.281	72.439.550.886	96,7
2010	78.000.000.000	87.661.335.427	112
2011	92.000.000.000	110.865.807.790	121
2012	131.000.000.000	142.766.250.847	109
2013	148.000.000.000	177.490.303.830	112,41

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung

Tabel 1.3
Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kota Bandung
Tahun 2009-2013

Tahun	Pajak Restoran		%
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	
2009	66.737.361.279	66.130.364.050	99
2010	73.300.000.000	73.573.789.261	100
2011	75.000.000.000	85.192.607.158	114
2012	88.500.000.000	98.040.550.470	111
2013	102.000.000.000	118.700.322.856	116,37

Sumber : Dinas Pendapatan daerah Kota Bandung

Tabel 1.2 dan tabel 1.3 Realisasi penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kota Bandung tahun 2009 penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran tidak memenuhi target yang telah ditetapkan, namun dari tahun 2010 sampai tahun 2013 penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kota Bandung merupakan salah satu kota yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi, dengan meningkatnya pendapatan yang berasal dari pajak daerah maka terlihat bahwa Pendapatan Asli Daerah juga mengalami peningkatan setiap tahunnya, tercatat tahun 2009 sampai 2013 realisasi penerimaan Pendapatan Asli daerah Kota Bandung mengalami peningkatan. Berikut daftar Pendapatan Asli Daerah Kota dan Kabupaten Bandung dalam lima tahun terakhir :

Tabel 1.4
Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung
Tahun 2009-2013

Tahun	Kota Bandung		%
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	
2009	374.712.000.000	360.152.627.690	96,11
2010	416.051.806.357	440.331.559.083	106
2011	719.575.563.243	803.663.585.485	112
2012	934.809.515.372	1.001.806.364.114	107
2013	1.407.759.106.133	1.194.087.447.016	112,33

Sumber : Dinas Pendapatan daerah Kota Bandung

Pada tabel 1.4 jumlah realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung melebihi target yang telah ditetapkan pada tahun 2010 sampai tahun 2013, namun jumlah realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung tahun 2009 tidak memenuhi target yang telah ditetapkan, seiring dengan penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran tahun 2009 juga tidak memenuhi target. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan atau penurunan Pajak Hotel dan Pajak Restoran akan diikuti oleh peningkatan atau penurunan PAD, karena Pajak Hotel dan Pajak Restoran merupakan sumber PAD Kota Bandung. Namun, masih banyaknya Pajak Hotel dan Pajak Restoran ini tidak dikelola dengan baik. Hal ini diberitakan dalam situs online Tribun Jabar (2012) yang menjelaskan bahwa adanya piutang pajak sebesar Rp 23,4 miliar yang harus segera ditagihkan. Dari beberapa piutang pajak yang belum tertagih itu diantaranya terdapat Pajak Hotel dan Pajak Restoran yang menunggak. Piutang Pajak yang menunggak tersebut sebesar Rp 1,5 miliar untuk Pajak Hotel dan Rp 3,9 miliar untuk Pajak Restoran. Karena masih banyaknya Pajak Hotel dan Pajak Restoran tidak dikelola dengan baik, sehingga kontribusi kedua pajak tersebut akan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Efektifitas menurut Halim (2004) digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungut suatu pajak dengan potensi pajak itu sendiri. Perhitungan efektifitas potensi dilakukan apabila jumlah potensi penerimaan pajak tidak sama

dengan target penerimaan pajak. Menurut Mahmudi (2010) kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah (khususnya pajak hotel dan pajak restoran) periode tertentu dengan penerimaan PAD periode tertentu.

Berdasarkan tabel 1.2 dan tabel 1.3 terlihat bahwa realisasi yang terjadi selalu lebih besar dari penentuan target oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung. Hal ini dikarenakan penentuan target yang hanya selalu berdasar pada penerimaan tahun-tahun sebelumnya sehingga memungkinkan target yang ditetapkan selalu bisa dicapai dengan realisasi penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran yang lebih besar (Dedeng Muryawan, Fungsiunal Umum Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung). Hal ini mengindikasikan bahwa Pajak Hotel dan Pajak Restoran belum tergali secara maksimal dalam pelaksanaannya. Peningkatan Pajak Hotel dan Pajak Restoran dari tahun ke tahun yang dihitung dari realisasi jumlah penerimaan belum dapat dijadikan ukuran keberhasilan pemungutan pajak yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung. Salah satu ukuran keberhasilan pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran adalah dengan cara menghitung efektivitas pemungutan Pajak Hotel.

Hasil dari penelitian Khotimah (2014) menunjukkan potensi pajak hotel dari tahun 2009–2013 mengalami kenaikan setiap tahunnya akan tetapi dalam efektifitas pajak hotel di kota Mojokerto dari tahun 2009–2013 mengalami tidak efektif dimana realisasi pajak hotel lebih kecil dibandingkan dengan potensi pajak hotel. Hasil penelitian Maya (2013) didapatkan bahwa pajak hotel secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD. Demikian pula halnya dengan pajak restoran. Pajak hotel dan pajak restoran secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD Kota Batu. Dari hasil penelitian Syah (2014) Penerimaan pajak hotel di Kota Semarang berdasarkan klasifikasinya tahun 2009- 2013 masih belum efektif. Penerimaan pajak hotel Kota Semarang belum memiliki kontribusi terhadap pendapatan asli daerah Kota Semarang selama tahun 2009 hingga 2013. Berdasarkan hasil penelitian Suartini dan Utama (2010) menunjukkan bahwa jumlah kunjungan wisatawan, pajak hiburan, pajak hotel dan restoran berpengaruh

signifikan terhadap PAD Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 1991-2010. Berdasarkan hasil penelitian Yeni dan Setiawan (2013) Penilaian Kinerja Keuangan, menunjukkan kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Denpasar berdasarkan konsep *Value for Money* atas penerimaan pajak hotel, restoran, dan hiburan Tahun 2008-2012 rata-ratanya dapat dikategorikan ekonomis, sangat efisien, dan sangat efektif.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung dengan judul : **“Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2009 sampai 2013 (Studi Kasus Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung)”**

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang diatas, maka rumusan masalah yang dapat disampaikan adalah senagai berikut :

1. Bagaimana Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Bandung tahun anggaran 2009-2013.
2. Bagaimana tingkat efektivitas Pajak Hotel dan Pajak Restoran serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung.
3. Bagaimana pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah secara simultan.
4. Bagaimana pengaruh secara parsial:
 - a. Bagaimana pengaruh Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah secara parsial?
 - b. Bagaimana pengaruh Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah secara parsial?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Bandung tahun anggaran 2009-2013.

2. Untuk mengetahui tingkat efektivitas Pajak Hotel dan Pajak Restoran serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung.
3. Mengetahui pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah secara simultan.
4. Mengetahui pengaruh secara parsial:
 - a. Pengaruh Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah secara parsial.
 - b. Pengaruh Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah secara parsial.

1.5. Kegunaan Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan bagi pihak-pihak yang memerlukannya. Kegunaan penelitian ini diantaranya adalah :

1. Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi penulis dan pembaca mengenai pajak daerah dan sebagai bahan masukan untuk penelitian sesudahnya.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi dinas pendapatan daerah Kota Bandung mengenai keberadaan sektor Pajak Hotel dan Pajak Restoran yang sangat potensial untuk dipungut.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini disusun untuk memberikan gambaran umum tentang penelitian yang dilakukan. Sistematika penulisan disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian yang berisi fenomena, perumusan masalah yang diteliti berdasarkan latar belakang penelitian, tujuan penelitian, kegunaan diadakan penelitian secara akademis, praktis dan sistematika penulisan secara umum.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LINGKUP PENELITIAN

Pada bab ini berisi mengenai penelitian sebelumnya, landasan teori yang digunakan sebagai dasar dari analisis penelitian, ruang lingkup penelitian, serta kerangka pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi objek penelitian, metode penelitian, operasionalisasi variable, skala pengukuran, jenis dan teknik pengumpulan data, teknik sampling dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan dari penelitian yang berupa analisa pengolahan data yang telah dilakukan dikaitkan dengan teori yang mendasari seperti yang telah diuraikan dalam Bab II dan asumsi yang telah ditetapkan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi rangkuman seluruh penelitian skripsi ini yang didapatkan dari pembahasan dan kemungkinan saran perbaikan ataupun pendapatan yang dikemukakan terkait dengan hasil pengolahan data yang dikaitkan dengan teori-teori yang mendasarinya.

“ Halaman ini sengaja dikosongkan ”